

WALHI
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

SAHUKAN
MAKLUMAT
INDONESIA

Peta Jalan Politik Hijau

Pulihkan Indonesia
2024

Latar Belakang



- Kondisi sistem politik di Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam *basic* struktur dan suprastruktur.
- Kekuasaan dari suprastruktur seperti Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif sangat luas dan dapat merusak cita-cita konstitusi dan Undang-Undang 45.
- WALHI, sebagai organisasi lingkungan hidup, merespons kondisi politik ini sejak era reformasi dengan fokus pada kekuatan politik yang mempengaruhi tatanan kekuasaan.
- Meskipun sistem politik bekerja sesuai dengan kondisinya, infrastruktur dikuasai oleh kekuatan modal yang menggunakan partai politik dan pemilu untuk kepentingan mereka.
- Pembatasan infrastruktur publik diarahkan untuk menjaga stabilitas politik, menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang hanya menjadi mimpi.

- Praktiknya, persaingan sempurna tidak ada, hanya pembagian kekuasaan atas sumber daya alam antara kekuatan modal.
- Upaya menjaga ketertiban warga diarahkan agar tidak mengganggu sistem ekonomi politik yang dibangun oleh kekuatan modal.
- Doktrin-doktrin kapitalisme yang ditanamkan sejak era kolonialisme masuk ke dalam tatanan sosial, menggantikan gotong royong dengan ekonomi ketergantungan.
- Pemilu dianggap sebagai ajang korporatokrasi, di mana partisipasi masyarakat semakin terabaikan, dan revisi UU tentang Pemberantasan Korupsi serta UU tentang Mineral dan Batubara menunjukkan pelemahan upaya pemberantasan korupsi.
- Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja bersyarat inkonstitusional, tetapi pemerintah justru mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- Demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, terjadi oligarki kekuasaan dan polarisasi politik identitas yang mengancam demokrasi dan keutuhan bangsa.
- Omnibus Law di tengah pandemi Covid-19 mengecilkan partisipasi masyarakat, merusak lingkungan hidup, dan melemahkan penegakan hukum.
- Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil, pemerintah melanjutkan dengan penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Krisis Global

Krisis pangan global akibat 3 fenomena: 1) Climate Change; 2) Covid 19; 3) Konflik Rusia-Ukraina

"Tingginya harga pangan disebabkan 30 % pasokan gandum dunia dari 2 negara yang berkonflik, selain itu disebabkan juga oleh naiknya harga energi karena teknologi pertanian dengan menggunakan energi, kemudian naiknya harga pupuk sampai 3 kali lipat."

"Dampaknya bagi Indonesia: Inflasi Tinggi, Penurunan Daya Beli Masyarakat, dan Dampak Krisis Pangan Global"

Kebijakan Pemerintah terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Produksi beras mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir, sementara produksi jagung fluktuatif dan stagnan, dipengaruhi oleh penguasaan lahan petani padi yang kecil dan berkurangnya lahan tanam.

Penurunan luas panen padi disebabkan oleh faktor iklim dan nilai ekonomis komoditas, serta kebijakan pemerintah yang belum optimal dalam meningkatkan produktivitas komoditas pangan.

Krisis Iklim: Negara Menjawab dengan Solusi Palsu

Ketergantungan ketenagalistrikan pada energi fosil menyebabkan gagalnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca, dengan pertambahan berkontribusi signifikan terhadap total emisi Indonesia.

Kontribusi besar sektor tambang terhadap emisi gas rumah kaca memiliki dampak serius, termasuk kerusakan ekosistem, gangguan terhadap ketahanan pangan, bencana iklim, penurunan kualitas udara, dan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Solusi palsu dalam transisi energi, seperti penggunaan sumber energi tidak terbarukan dan proyek energi yang merugikan lingkungan, terus diadopsi oleh pemerintah, meningkatkan risiko terhadap ekosistem kritis dan memperlebar ketidakestaraan sosial serta potensi konflik sosial.

Poros Maritim Dunia

Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia: Indonesia memiliki luas wilayah laut yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 2,55 juta kilometer persegi. Wilayah laut yang luas ini menjadi sumber daya kelautan yang sangat potensial.

Kekayaan Sumber Daya Kelautan: Laut Indonesia merupakan bagian terbesar dari Segitiga Terumbu Karang dunia, yang merupakan habitat 76% dari seluruh spesies terumbu karang dan 37% dari seluruh spesies ikan terumbu karang di dunia. Potensi kelautan ini memberikan keuntungan besar, dengan 2,8 juta rumah tangga yang terlibat langsung dalam industri maritim.

Kontribusi Sektor Perikanan: Sektor perikanan memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia, mencapai nilai sektor perikanan sebesar 29,6 miliar dolar AS pada tahun 2022, setara dengan 2,6% dari PDB Indonesia. Udang, Tuna-Cakalang, Cumi-Sotong-Gurita, Rajungan-Kepiting, dan Rumput Laut menjadi komoditas unggulan dalam ekspor perikanan.

Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya: Pemerintah Indonesia menganggap subsektor perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional melalui ekspor. Namun, ada kebijakan yang menunjukkan orientasi neoliberal, terutama dalam sektor perikanan tangkap dengan diterapkannya sistem kontrak di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara.

Tantangan dan Masalah: Meskipun potensi sumber daya kelautan besar, ada masalah struktural, seperti kemiskinan di daerah pesisir. Pemerintah berupaya mengatasi kemiskinan melalui berbagai kebijakan, tetapi tingkat kemiskinan ekstrem masih signifikan, terutama di wilayah pesisir.

Ancaman Terhadap Masyarakat Pesisir: Kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih memfokuskan pada investasi dapat menjadi ancaman bagi masyarakat pesisir dan pulau kecil, khususnya setelah adanya UU Cipta Kerja. Perlu adanya perhatian terhadap akses masyarakat pesisir terhadap sumber daya alam mereka sendiri.

Pentingnya Tata Kelola yang Berkelanjutan: Poin akhir menekankan bahwa ekonomi biru yang diinginkan pemerintah harus berlandaskan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya tersebut. Prinsip ini sesuai dengan regulasi yang mengatur tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Situasi Nasional dan Penguasaan Sumber Daya Alam

Industri perkebunan, pertambangan, dan sektor minyak dan gas menguasai luas kawasan yang signifikan.

Penguasaan lahan industri korporasi tumpang tindih dengan kawasan penting.

Di Darat dan Laut Oligarki Jaya

▼ Aktivitas pertambangan massif, proyek reklamasi, pariwisata, dan pertambangan udang skala besar di pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia menyebabkan kerusakan lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat setempat.

Kedaulatan: Akses dan Pengelolaan ruang hidup

- ▼ Pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak tepat oleh penyelenggara negara melahirkan perusakan lingkungan dan konflik berkepanjangan.
- ▼ Krisis ekologis tidak kunjung membaik, ditandai dengan peningkatan kuantitas bencana hidrometeorologis dan konflik agraria.
- ▼ Kondisi akses rakyat terhadap kedaulatan ruang hidup mengalami krisis mendalam karena ketidakpenuhan pilar utama keadilan lingkungan hidup.
- ▼ Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak dilaksanakan sepenuhnya, menyebabkan distribusi sumber daya alam dan agraria cenderung menguntungkan korporasi dan oligarki.

Bencana Ekologis: Krisis Langgeng Umat Manusia

- ▼ Krisis multidimensi disebabkan oleh industri ekstraktif dan proyek ambisius tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Daya rusak dari masa lalu dan upaya perusakan saat ini menjadi pemicu utama.
- ▼ Kebijakan tidak memperhitungkan kondisi lingkungan, memaksa aktivitas berisiko tinggi di wilayah rawan bencana.
- ▼ Kebijakan transisi energi pemerintah malah memperpanjang krisis dengan melanggengkan model energi fosil, menjaga keberlanjutan bisnis oligarki.

Puncak Krisis Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan

- ▼ Bencana ekologis disebabkan oleh siklus praktik kejahatan lingkungan oleh negara, yang dimulai dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak-hak sipil/ekosob warga negara.
- ▼ Negara memperburuk situasi dengan kebijakan pengelolaan respon bencana yang parsial dan cenderung karitatif, tanpa upaya serius untuk melakukan pemulihan ekologis guna mencegah terjadinya bencana ekologis di masa depan.

Pengabaian Hak Atas Air

- ▼ Krisis air terus terjadi di berbagai daerah dengan dua lingkup utama: krisis akibat kekeringan, perubahan iklim, dan daya dukung lingkungan, serta krisis akses karena salah urus tata kelola air oleh pemerintah.
- ▼ Pemerintah kurang memberikan perhatian serius terhadap kedua lingkup krisis ini, bahkan memfasilitasi privatisasi air oleh swasta, BUMD, hingga BUMDES, seperti terlihat di Kalimantan Barat yang mengalami darurat air akibat ekspansi investasi dan aktivitas eksploitatif seperti perkebunan kelapa sawit dan pertambangan yang merusak sungai-sungai, termasuk sungai Kapuas yang telah tercemar sejak tahun 2013.

Industri Ekstraktif

- ▼ Industri ekstraktif terus meningkat di berbagai daerah, merugikan kawasan lindung dan esensial.
- ▼ Krisis ekologi meliputi kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan abai prioritaskan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.

Situasi Politik di Daerah

- ▼ Darurat Ekologis di Tingkat Daerah: Bencana ekologis berulang dengan peningkatan kerusakan kuantitas dan kualitas. Kebijakan pemerintah mengabaikan daya dukung lingkungan dan hak-hak warga negara.
- ▼ Otonomi Daerah Tidak Mengarah ke Demokratisasi dan Desentralisasi: Otonomi daerah dimanfaatkan untuk perampasan sumber daya alam oleh lembaga-lembaga politik. Maraknya kebijakan eksploitasi mineral tanpa memperhatikan keadilan ekologi dan HAM.

Akar Krisis



Kemunduran Demokratisasi SDA Melalui Autokratik Legalism

Legalisasi krisis lingkungan hidup terkait dengan kebijakan, mencerminkan *autocratic legalism* yang merugikan sumber daya kehidupan, seperti revisi UU KPK, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba.



Sistem Ekonomi Menghisap

Bahwa 55% anggota DPR Indonesia merupakan pebisnis, dengan temuan kolerasi antara penyusunan regulasi, kepentingan politik, dan bisnis, mengindikasikan kuatnya relasi kuasa-modal di pemerintahan, berkontribusi pada melemahnya kualitas demokrasi dan pengurangan ruang partisipasi masyarakat sipil.



Sistem Politik



Bahwa sistem politik dan ekonomi kapitalis merupakan akar persoalan lingkungan hidup, masa depan Bumi, dan keselamatan rakyat, yang hanya mengutamakan keuntungan dengan mengabaikan urusan lingkungan hidup.



Krisis politik karena parlemen dan wakil rakyat kehilangan kekuasaan nyata, dengan keputusan politik, ekonomi, dan sosial banyak ditentukan oleh petinggi perusahaan raksasa.



Praktek legislasi pemerintah yang seringkali diakomodir tanpa partisipasi publik, menciptakan kekuasaan politik uang dan oligarki yang mengabaikan kepentingan rakyat.



Bahwa regulasi dan kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik cenderung mendukung akumulasi modal pengusaha dan investor, mengabaikan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.



Bahwa sistem ini berkontribusi pada akumulasi pengerukan kekayaan alam dan penghisapan tenaga-tenaga rakyat, yang menyebabkan krisis tidak terpulihkan dan mengancam kelangsungan sumber-sumber kehidupan rakyat, termasuk krisis politik, ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.



Bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran setelah dua dekade reformasi, dengan perkembangan sistem politik yang memberikan peluang besar bagi kaum status quo dan pemodal besar untuk tetap eksis.



Bahwa sistem politik seharusnya bertumpu pada cita-cita bernegara yang menjamin kesejahteraan seluruh rakyat, namun kenyataannya hasil dari sistem politik justru menjauhkan rakyat dari cita-cita luhur bangsa, menciptakan oligarki dari pusat hingga tingkat lokal pedesaan.



Bahwa demokrasi prosedural, seperti Pemilu, perlu dievaluasi karena hasilnya belum selalu mencerminkan kepentingan rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi cenderung menguatkan kekuatan elit politik dan ekonomi.

Jalan Keluar Krisis: Menuju Indonesia Berkeadilan Ekologis

Berorientasi pada nilai



Berorientasi pada nilai-nilai seperti Hak Asasi Manusia, Demokrasi, Keadilan Gender, Keadilan Ekologis, Keadilan Antar Generasi, Persaudaraan Sosial, Anti Kekerasan, Keberagaman, dan prinsip utama seperti Keterbukaan, Keswadayaan, Profesional, Ketauladanan, dan Kesukarelawanan.



Mendorong proses transformasi sosial dengan mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat, mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat, mendekonstruksi tatanan ekonomi kapitalistik global, membangun alternatif tata ekonomi baru, serta mendesak kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.

Keadilan Ekologis: Keadilan untuk Semua

1. Keadilan Ekologis:
 - Fokus pada persinggungan eksploitasi manusia dan alam, termasuk ketidaksetaraan dalam akses dan kontrol sumber daya alam.
 - Melibatkan kewajiban etis terhadap biosfer dan makhluk yang menghuninya.
 - Terkait erat dengan kesetaraan, HAM, hak kolektif, dan tanggung jawab sejarah terhadap isu lingkungan.
2. Visi Keadilan Ekologis:
 - Mengurangi beban timpang dari pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam.
 - Mengedepankan keadilan iklim, keadilan lingkungan, keadilan antar-generasi, dan keadilan sosial.
3. Pemenuhan Konstitusi dan Kedaulatan Rakyat:
 - UUD 1945 menegaskan perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia dan kedaulatan berada di tangan rakyat.
 - Defisit kedaulatan terkait dengan kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial.
4. Kedaulatan Rakyat dan Keadilan Sosial-Ekologis:
 - Kedaulatan rakyat harus dibangun berdasarkan pengelolaan sumber daya oleh rakyat untuk kepentingan hak asasi warga negara.
 - Kunci untuk keadilan sosial dan ekologis adalah pemerataan alokasi dan distribusi sumber daya sosial dan lingkungan hidup.
 - Tujuannya adalah memastikan pemihakan terhadap kelompok terlemah, kebutuhan dasar terpenuhi, dan keadilan sosial-ekologis terwujud.
5. Aksi Pemilik Kedaulatan:
 - Politik hijau sebagai agenda perubahan untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat.
 - Pulihkan Indonesia sebagai negara supremasi hukum untuk mengatasi konflik sumber daya alam dan lingkungan.
 - Tatanan demokrasi berlandaskan HAM dan konstitusi, dengan peran utama rakyat dalam pengambilan keputusan.



Memulihkan Multi Krisis Ekologi, Iklim, Pangan, Energi dan Mengatasi Bencana Ekologis



Mewujudkan keadilan iklim di Indonesia sebagai pendekatan berbasis hak asasi manusia dan hubungan dengan pembangunan.



Integrasi nilai-nilai keadilan distributif, tanggung jawab bersama, pemerataan kesejahteraan, keadilan rekognitif, keadilan prosedural, keadilan korektif, keadilan antar-generasi, dan keadilan gender.

Agenda Perubahan

- Mendorong Sistem Ekonomi Nusantara
- Memperkuat rakyat untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber-sumber kehidupan
- Mendorong adanya perbaikan kebijakan Negara terhadap kawasan ekosistem penting dan genting sebagai sumber-sumber kehidupan rakyat
 - Reformasi Kelembagaan
- Membangun Kekuatan Alternatif Politik Rakyat